



RUJUKAN STUDI BANDING DARI BERBAGAI DAERAH

Komisi A Komitmen Buka Ruang Diskusi

YOGYA (KR) - Komisi A DPRD Kota Yogya menyatakan diri siap untuk membuka ruang diskusi dari berbagai pihak. Hal ini seiring keberadaan Kota Yogya yang sering menjadi rujukan dari berbagai daerah untuk kepentingan studi banding.



KR-Ardhi Wahdan

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Yogya (kiri) menerima kunjungan Komisi A DPRD Kota Bandung.

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Yogya Marwoto Hadi, mengungkapkan jajaran internal komisinya sudah berkomitmen untuk meladeni secara langsung berbagai pihak yang secara khusus ingin menyinggung gagasan maupun kebijakan berkaitan ketugasannya.

"Komitmen ini kami bangun dalam rangka mewujudkan keterbukaan arus informasi. Makanya ketika ada kunjungan ke sini, kami juga siap membuka diskusi. Silakan datang ke Yogya, kita sharing bersama," tandasnya usai menerima jajaran Komisi A DPRD Kota Bandung di gedung dewan, Senin (27/5).

Menurutnya, hampir setiap hari selalu ada tamu dari luar daerah dengan tujuan studi tiru. Hal itu tidak lepas dari Kota Yogya sebagai ibukota provinsi sekaligus telah menelurkan beragam inovasi. Seperti halnya Komisi A DPRD

Kota Bandung yang ingin sharing berkaitan tugas Komisi A DPRD Kota Yogya bersama mitra kerja eksekutif.

Terutama mitra kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) berkaitan dana bantuan politik hingga kepastian pelantikan anggota dewan periode 2024-2029. Apalagi sempat muncul informasi atau desas-desus ketidakpastian waktu pelantikan serta teknis pencairan dana bantuan politik. Simpang siur informasi itu pun memunculkan berbagai persepsi.

Terkait hal tersebut, Marwoto menilai jajaran di Kota Yogya selalu menyelaraskan pada aspek aturan. Hingga saat ini agenda pelantikan anggota dewan terpilih tetap berpedoman pada waktu berakhirnya masa jabatan dewan periode 2029-2024 yakni 12 Agustus 2024 mendatang. "Kami tidak ada

perubahan jadwal pelantikan. Saat periode saat ini habis maka saat itu juga dilakukan pelantikan sehingga tidak ada kekosongan jabatan. Sesuai aturan kan masa jabatan anggota dewan lima tahun," jelasnya.

Begitu pula menyangkut dana bantuan politik bagi parpol peraih kursi di dewan yang pencairannya disesuaikan kewenangan masing-masing daerah. Hanya, di Kota Yogya terjadi perubahan nominal dari sebelumnya sekitar Rp 3.000 persuara naik menjadi Rp 8.000 persuara.

Pihaknya sempat mengusulkan disamakan dengan DIY yakni Rp 15.000 persuara namun melalui proses dialog akhirnya tersepakati Rp 8.000 persuara.

"Usulan kami itu sebetulnya realistis karena yang memiliki suara adalah kota. Kemudian yang betul-betul mencari suara hingga mengawasi itu aktivitasnya ada di kota dan kabupaten dengan melibatkan kemantren dan kelurahan. Sehingga pembiayaan lebih banyak memang di kota dan kabupaten," urainya.

Selain itu, dirinya juga memastikan komposisi alat kelengkapan dewan dilandasi dengan semangat kebersamaan. Pemenuhan anggota disesuaikan dengan tata tertib yang tentunya dimiliki oleh setiap lembaga dewan. Sedangkan pimpinan alat kelengkapan ditentukan oleh masing-masing anggotanya.

"Semangat kebersamaan ini yang kami bangun di DPRD Kota Yogya," tandasnya.

Sementara Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Rizal Khairi, menilai Kota Yogya selalu menjadi tujuan wajib dalam untuk studi tiru. Oleh karena itu ketika muncul berbagai informasi yang berbeda pihaknya berupaya mencari perbandingan di daerah lain.

(Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005